

Rekonstruksi Global Governance dalam Menghadapi Kompleksitas Tantangan Global Kontemporer: Analisis Kritis terhadap Efektivitas dan Transformasi Tata Kelola Global

Salsa Bilah (2316041052)¹, Vira Eka Novianti (2356041002)²,

Amelia Elidia Candaw (2356041008)³,

Yuffa Rona Maully (2356041013)⁴, Meyta Indira Altasya (2356041015)⁵.

¹ *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.*

² *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.*

³ *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.*

⁴ *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.*

⁵ *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.*

Corresponding e-mail: meythatasya@gmail.com

Abstrak

Globalisasi telah menciptakan interdependensi yang semakin kompleks antarnegara, yang pada gilirannya melahirkan berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik internasional. Tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara unilateral, sehingga memerlukan mekanisme tata kelola global (global governance) yang efektif dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas global governance dalam menghadapi tantangan global kontemporer serta mengidentifikasi kelemahan struktural yang menghambat implementasinya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber akademik dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa global governance memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kerja sama internasional, namun efektivitasnya masih terbatas oleh asimetri kekuasaan, lemahnya mekanisme penegakan, serta dominasi kepentingan nasional. Studi kasus pada penanganan COVID-19 dan implementasi Paris Agreement memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen global dan realisasi di tingkat nasional.

Kata kunci: Global Governance, Tantangan Global, Globalisasi, Kerja Sama Internasional, Kebijakan Global

Perkembangan globalisasi telah mempercepat intensitas interaksi lintas batas negara dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan. Interkoneksi tersebut tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menghasilkan berbagai permasalahan global yang kompleks dan saling terkait. Fenomena seperti perubahan iklim, pandemi global, serta konflik geopolitik menunjukkan bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi yang semakin rentan terhadap krisis multidimensional.

Dalam konteks ini, konsep global governance menjadi relevan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana aktor-aktor internasional mengelola isu-isu global. Kehadiran United Nations sebagai institusi multilateral mencerminkan upaya kolektif dalam menciptakan keteraturan global. Namun demikian, efektivitas global governance masih menjadi perdebatan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Krisis global seperti pandemi COVID-19 telah mengungkap kelemahan sistem global governance, khususnya dalam hal koordinasi internasional dan distribusi sumber daya. Selain itu, isu perubahan iklim menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen global dan implementasi kebijakan nasional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap peran, efektivitas, serta keterbatasan global governance dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep global governance dalam konteks globalisasi.
2. Mengidentifikasi tantangan global utama yang dihadapi dunia saat ini.
3. Mengevaluasi efektivitas global governance dalam menangani tantangan global.
4. Mengkaji kelemahan struktural dalam sistem global governance.
5. Merumuskan rekomendasi untuk penguatan tata kelola global di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi literatur (library research). Data dikumpulkan melalui:

1. jurnal ilmiah bereputasi
2. buku akademik
3. laporan organisasi internasional seperti World Health Organization & United Nations

Teknik analisis data dilakukan melalui:

1. Reduksi data: pemilahan informasi relevan terkait global governance.
2. Analisis tematik: pengelompokan berdasarkan isu global utama.
3. Interpretasi kritis: evaluasi efektivitas dan kelemahan sistem global governance.

Landasan Teori

Konsep Global Governance

Konsep global governance merujuk pada mekanisme, institusi, norma, dan proses yang digunakan oleh berbagai aktor internasional untuk mengelola isu-isu global yang melampaui batas negara. Tidak seperti pemerintahan global (world government), global governance tidak memiliki otoritas tunggal, melainkan melibatkan aktor negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Menurut United Nations (PBB), global governance mencerminkan upaya kolektif dalam menciptakan keteraturan global melalui kerja sama multilateral. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya kompleksitas hubungan internasional akibat globalisasi.

Secara teoritis, global governance dapat dipahami melalui pendekatan:

1. Liberal institusionalisme: menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama.
2. Realisme: melihat global governance sebagai alat negara kuat untuk mempertahankan kepentingan.
3. Konstruktivisme: menyoroti peran norma dan nilai dalam membentuk tata kelola global.

Konsep global governance dalam kajian Hubungan Internasional merujuk pada sistem aturan, institusi, dan proses yang mengatur interaksi global tanpa adanya otoritas tunggal.

1. Teori Liberal Institusionalisme

Teori ini menekankan bahwa kerja sama internasional dapat dicapai melalui institusi global yang mengurangi ketidakpastian dan konflik antarnegara (Keohane, 2005).

2. Teori Realisme

Realisme memandang global governance sebagai refleksi dari distribusi kekuasaan global, di mana negara besar memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan.

3. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme menyoroti pentingnya norma, nilai, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor global (Zürn, 2018).

Ketiga pendekatan ini memberikan perspektif komprehensif dalam memahami dinamika global governance.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Global: Perubahan Iklim sebagai Krisis Eksistensial Global

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan suhu global, naiknya permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Kesepakatan global seperti Paris Agreement mencerminkan upaya kolektif untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C. Namun demikian, implementasi komitmen nasional (Nationally Determined Contributions) masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kepatuhan negara dan kesenjangan kapasitas antara negara maju dan berkembang.

Masalah ini bersifat global karena:

1. emisi gas rumah kaca tidak mengenal batas negara
2. dampaknya dirasakan secara kolektif
3. membutuhkan kerja sama internasional

Pandemi Global dan Kerentanan Sistem Internasional

Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana sistem global yang terintegrasi dapat menjadi jalur percepatan krisis. Penyebaran virus yang cepat lintas negara mengungkap kelemahan dalam sistem kesehatan global dan koordinasi internasional.

Peran World Health Organization sebagai aktor utama dalam global health governance menjadi krusial, namun terbatas oleh:

1. kurangnya kewenangan supranasional,
2. ketergantungan pada negara anggota,
3. politisasi kebijakan kesehatan global.

Konflik Internasional dan Instabilitas Global

Konflik geopolitik seperti Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa sistem global governance masih kesulitan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik berskala besar.

- a. Dampak konflik ini meluas hingga:
- b. krisis energi global,
- c. gangguan rantai pasok pangan,
- d. peningkatan ketegangan geopolitik.

Hal ini menunjukkan bahwa global governance belum mampu secara efektif mengatasi

konflik yang melibatkan kepentingan negara besar.

Analisis Kritis Global Governance

Evaluasi Efektivitas Global Governance

Secara normatif, global governance bertujuan menciptakan keteraturan global melalui kerja sama multilateral. Namun, dalam praktiknya, efektivitasnya masih terbatas.

Menurut Weiss (2013), global governance sering kali mengalami “governance gap”, yaitu kesenjangan antara kebutuhan global dan kapasitas institusional untuk meresponsnya.

Analisis (Pendapat Kelompok)

1. Apakah Global Governance Sudah Efektif?

Secara normatif, global governance memiliki tujuan yang ideal, yaitu menciptakan stabilitas dan kerja sama global. Namun, dalam praktiknya, efektivitasnya masih terbatas.

Beberapa indikator menunjukkan ketidakefektifan:

- a) lambatnya respons terhadap krisis global,
- b) dominasi negara besar dalam pengambilan keputusan,
- c) lemahnya implementasi kebijakan global.

Kelemahan Global Governance

1. Ketimpangan Kekuasaan

Negara maju memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan negara berkembang, sehingga kebijakan global sering bias kepentingan tertentu.

2. Kurangnya Otoritas Mengikat

Banyak keputusan bersifat rekomendasi, bukan kewajiban hukum, sehingga implementasinya lemah.

3. Fragmentasi Institusi

Banyak organisasi internasional bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal.

4. Politik Nasional vs Kepentingan Global

Negara cenderung memprioritaskan kepentingan domestik dibanding komitmen global.

Argumen Kelompok

Kelompok kami berargumen bahwa global governance saat ini berada dalam kondisi transisi struktural, di mana:

1. sistem lama tidak lagi memadai,
2. namun sistem baru belum sepenuhnya terbentuk.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju model global governance yang:

- a. lebih inklusif,
- b. lebih adaptif,
- c. dan berbasis keadilan global (global justice).

Contoh Nyata & Studi Kasus

Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana global governance bekerja.

Apa yang terjadi:

- Virus menyebar secara global dalam waktu singkat.
- Negara-negara menerapkan kebijakan berbeda (lockdown, vaksinasi).

Peran Global Governance:

- World Health Organization memberikan pedoman global.
- Inisiatif COVAX untuk distribusi vaksin secara merata.

Hasil Analisis:

- Keberhasilan: koordinasi awal dan pertukaran informasi.
- Kegagalan: ketimpangan akses vaksin antara negara maju dan berkembang.

Kerja Sama Perubahan Iklim

Upaya global melalui Paris Agreement merupakan contoh penting global governance.

Apa yang terjadi:

- Negara-negara sepakat mengurangi emisi karbon.
- Target pembatasan kenaikan suhu global.

Peran Global Governance:

- Menyediakan forum negosiasi global.
- Mendorong komitmen nasional (Nationally Determined Contributions).

Hasil Analisis:

- Keberhasilan: adanya kesepakatan global.
- Kelemahan: tidak semua negara konsisten menjalankan komitmen.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa global governance merupakan suatu konstruksi institusional dan normatif yang esensial dalam merespons kompleksitas tantangan global kontemporer. Dalam kondisi dunia yang semakin terintegrasi akibat globalisasi, berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, pandemi global, serta konflik internasional telah melampaui kapasitas negara-bangsa untuk menanganinya secara mandiri. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama multilateral yang difasilitasi oleh institusi global menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Keberadaan United Nations sebagai representasi utama tata kelola global mencerminkan upaya kolektif dalam membangun keteraturan internasional berbasis norma dan kesepakatan bersama. Demikian pula, peran World Health Organization dalam penanganan krisis kesehatan global serta implementasi Paris Agreement dalam isu perubahan iklim menunjukkan bahwa global governance memiliki kapasitas untuk memfasilitasi koordinasi global.

Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas global governance masih berada dalam kondisi yang paradoksal. Di satu sisi, ia menjadi instrumen utama dalam mengoordinasikan respons global; di sisi lain, ia mengalami berbagai keterbatasan struktural yang signifikan. Keterbatasan tersebut meliputi asimetri kekuasaan antarnegara, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, fragmentasi institusi global, serta dominasi kepentingan nasional yang kerap menghambat tercapainya konsensus global.

fenomena governance gap menjadi indikator utama bahwa terdapat kesenjangan antara kompleksitas tantangan global dengan kapasitas respons institusional yang tersedia. Studi kasus seperti penanganan COVID-19 menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sumber daya dan lemahnya solidaritas global, sementara implementasi kesepakatan iklim global memperlihatkan inkonsistensi komitmen negara dalam memenuhi kewajiban internasional.

Dapat disimpulkan bahwa global governance belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan idealnya, namun tetap merupakan mekanisme yang tidak tergantikan dalam sistem internasional saat ini. Posisi ini menempatkan global governance dalam fase transisional, di mana diperlukan transformasi struktural untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan keadilan dalam tata kelola global.

Penutup

Menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, penguatan global governance menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Transformasi tata kelola global harus diarahkan pada pembentukan sistem yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan global, khususnya bagi negara-negara berkembang yang selama ini cenderung berada dalam posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan.

Reformasi institusi global perlu dilakukan untuk mengurangi dominasi negara-negara besar dan menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang. Selain itu, penguatan mekanisme hukum internasional yang bersifat mengikat menjadi penting untuk memastikan bahwa komitmen global tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret.

Peningkatan peran aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas epistemik juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas global governance. Pendekatan kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diyakini mampu menciptakan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Masa depan global governance sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor-aktor global mampu mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan nasional sempit. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat dan solidaritas global yang nyata, berbagai tantangan global akan terus berkembang menjadi krisis yang lebih kompleks.

Daftar Pustaka

- Weiss, T. G. (2016). *Global governance: Why? what? whither?*. John Wiley & Sons.
- Held, D., & McGrew, A. (Eds.). (2000). *The global transformations reader* (Vol. 294). Cambridge: Polity Press.
- Keohane, R. O. (2005). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton university press.
- Zürn, M. (2018). *A theory of global governance: Authority, legitimacy, and contestation*. Oxford University Press.
- World Health Organization. (2023). *Fourth round of the global pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: November 2022–January 2023: interim report, 1 May 2023* (No. WHO/2019-nCoV/EHS_continuity/survey/2023.1). World Health Organization.
- Klein, D., Carazo, M. P., Doelle, M., Bulmer, J., & Higham, A. (Eds.). (2017). *The Paris Agreement on climate change: Analysis and commentary*. Oxford University Press.
- Imade, L. (2023). COVID-19 pandemic exposes deep fault lines in global health governance. *Journal of Global Faultlines*, 10(2), 190-209.
- Legg, S. (2021). IPCC, 2021: Climate change 2021-the physical science basis. *Interaction*, 49(4), 44-45.
- Acharya, A. (2016). Regionalism beyond EU-centrism. *The Oxford handbook of comparative regionalism*, 109-130.